BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Strategi dalam Mengembangkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif

Dari temuan penelitian melalui wawancara dan observasi, strategi dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan beberapa tahapan.

a) Perencanaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan layanan perpustakaan inklusif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui pemetaan kebutuhan kelompok pengguna. Pemetaan ini menjadi dasar penting dalam merancang layanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat, sehingga perpustakaan dapat memberikan akses yang setara bagi semua kalangan. Berdasarkan wawancara dengan informan dan observasi langsung, ditemukan bahwa layanan perpustakaan terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok anak-anak dan masyarakat umum, serta kelompok penyandang disabilitas.

1. Kelompok Anak-Anak dan Masyarakat Umum

   Semua masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang baik dan mengakses sumber daya yang ada di perpustakaan, baik dari sisi koleksi maupun fasilitas. Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kallimantan Selatan

menyediakan layanan umum dengan koleksi yang meliputi hampir semua bidang ilmu pengetahuan.

> "Kalo untuk umum ya, semua jenis koleksi kita sediakan. Kemudian hampir semua bidang ilmu pengetahuan ada di sini, jadi menurut saya sangat-sangat relevan dengan pemustaka kita ya, dari kalangan umum ya. Misalnya dia mahasiswa kan ada buku-buku mahasiswa, ada orang yang masyarakat biasa juga ada, ilmu terapan gitu ya bisa dipakai, untuk anak-anak juga ada, jadi saya rasa koleksi kita sudah sesuai dengan pemustaka perpustakaan umum."[46]

Koleksi tersebut bisa mencakup buku atau literatur akademik yang relevan bagi mahasiswa, ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum, hingga bacaan lain seperti novel, pengetahuan umum, dan koleksi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah melakukan upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna dengan latar belakang yang beragam. Informan lain juga menjelaskan bahwa layanan umum tersebut bisa diakses untuk rentang usia remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan.

> "Kita di sini ada layanan yang pertama untuk layanan umum, buku-buku umum yang rentang usianya dari 13 tahun, dari remaja ke dewasa-dewasa lah. Kemudian ada untuk layanan anak-anak ada."[47]

Informan juga menjelaskan bahwa layanan anak-anak juga tersedia di perpustakaan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam wawancara. Namun berdasarkan hasil observasi, layanan anak-anak dirancang secara khusus dengan menyediakan beragam bahan bacaan seperti buku cerita, buku bergambar, dan berbagai jenis bacaan lain yang sesuai dengan usia mereka. Rak buku dibuat rendah sehingga

[46] Wawancara dengan H, Pustakawan, 10 oktober 2025
[47] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 17 September 2025

memudahkan anak-anak untuk menjangkaunya. Selain itu, di samping ruang layanan anak terdapat area bermain seperti ayunan, perosotan, dan permainan lainnya. Kondisi ini menciptakan suasana yang menyenangkan sekaligus mendukung minat baca sejak usia dini.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah melakukan pemetaan dengan mempehatikan kebutuhan dasar dari anak-anak, kebutuhan akademik, hingga masyarakat luas.

2. Kelompok Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas juga berhak memperoleh perhatian dalam mengakses layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menegaskan bahwa meskipun jumlah pengunjung dari kalangan disabilitas masih terbatas, perpustakaan tetap menyediakan layanan khusus. Layanan tersebut mencakup koleksi braille bagi difabel netra, komputer yang ramah difabel netra (komputer pembaca layar), serta keberadaan tutor/pendamping yang mendampingi pemustaka dalam menggunakan fasilitas tersebut. Informan menyatakan:

> "Kemudian untuk layanan disabilitas ada, walaupun sekarang masih kurang pengunjungnya, tetapi kami tetap menyediakan buku-buku braille, kemudian komputer yang ramah difabel netra dan ada tutornya."[48]

Hasil observasi menambahkan bahwa perpustakaan juga menyediakan kursi roda bagi pengguna dengan keterbatasan fisik. Fasilitas ini menjadi bentuk dukungan tambahan agar pemustaka dengan hambatan mobilitas tetap dapat mengakses layanan perpustakaan.

[48] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 17 September 2025

Namun, pada saat penelitian dilakukan, belum ditemukan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi penyandang tunarungu maupun tunawicara. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pustakawan atau pendamping disabilitas ini juga masih kurang, karena hanya ada satu orang yang melayani dan mendampingi mereka dalam menggunakan sarana prasarana yang disediakan. Hal ini menandakan bahwa layanan inklusif masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya optimal untuk menjangkau seluruh jenis disabilitas.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah melakukan pemetaan dengan memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas, khususnya difabel netra dan pengguna dengan keterbatasan fisik. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan fasilitas bagi tunarungu dan tunawicara yang perlu diperkuat agar prinsip inklusivitas dapat terwujud secara menyeluruh.

b) Pelaksanaan

Adapun strategi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan Program Inklusif

Bagian ini menyajikan gambaran program-program dalam konteks strategi pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif. Peneliti menemukan dua program utama yang dinilai inklusif oleh informan:

> “Ada program kegiatan yang utamanya memang untuk masyarakat umum, misalnya bedah buku. Jadi kami survei, meminta

> buku apa yang mau dibedah, nah itu, peran masyarakat di situ. Tetapi yang mengadakan acaranya kami, tidak ada peran dari masyarakat, dari sekolah kah, dari universitas tidak ada, nah itu murni Dinas Perpustakaan yang bekerja. Kemudian ada turun perpustakaan keliling, bisa ke sekolah-sekolah, ke desa-desa atau tempat-tempat umum."[49]

Dalam wawancara tersebut, informan menyampaikan bahwa program bedah buku diselenggarakan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat mengenai judul buku yang akan dibahas, meskipun yang mengatur pelaksanaannya adalah perpustakaan. Informan juga menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki perpustakaan keliling yang biasanya sering diadakan di berbagai lokasi seperti sekolah, desa, ataupun tempat-tempat umum yang terbuka.

Dari penjelasan tersebut, dua program yang dipandang inklusif oleh informan adalah Bedah Buku dan Perpustakaan Keliling. Keduanya memiliki peran dalam upaya memperluas jangkauan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Berikut adalah tabel yang menyajikan ringkasan program-program yang berkaitan dengan kedua program tersebut, yang memuat informasi mengenai tempat kegiatan, dan lain-lain.

[49] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 Oktober 2025

Tabel 4.1 Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan

Bulan Juli – September 2025

No.	Judul	Waktu	Deskripsi	Tempat
1	Bedah Buku bersama Khairul Trian & Romansaku	8 Agustus 2025	Hut Kalsel ke 75 "Bedah Buku dan *Workshop Book Review"*	Aula Dispersip Kalsel
2	Perpustakaan Keliling	27 September 2025	Mendekatkan masyarakat, khususnya anak-anak dengan dunia pustaka	Taman Edukasi Banua Lalu Lintas, Banjarmasin

Sumber: Kantor Dispersip Kalsel

Tabel ini menyajikan ringkasan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan sebagai bagian dari pengembangan layanan yang bersifat inklusif. Dua kegiatan Bedah Buku pada tanggal 8 Agustus 2025 dilaksanakan pada hari yang sama dalam waktu yang berbeda, dengan menghadirkan penulis yang berbeda pada masing-masing sesi.

Program Perpustakaan Keliling pada tanggal 27 September 2025 memperlihatkan pelaksanaan layanan yang ditujukan untuk mendekatkan

masyarakat, terutama anak-anak, dengan bahan bacaan. Semua program tersebut bersifat terbuka.[50]

a) Bedah buku

Program Bedah Buku merupakan salah satu kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan sebagai bagian dari upaya pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif. Program ini tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi mengenai sebuah buku, tetapi juga membuka ruang diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pelaksanaan program ini menjadi penting karena berpotensi meningkatkan literasi, memperluas akses pengetahuan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan edukatif. Berikut merupakan hasil penelitian terkait pelaksanaan program Bedah Buku.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan bedah buku, informan menjelaskan bedah buku ini terbuka untuk umum termasuk mahasiswa, pelajar atau masyarakat umum:

> "Bedah buku itu tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi ada untuk anak SMA, ada untuk tenaga pendidik atau ada untuk masyarakat umum."[51]

Informan juga menambahkan bahwa dalam program ini melibatkan pihak lain agar berjalan lebih baik:

> "Tetapi kalau mengandalkan anggaran dinas perpustakaan saja itu tidak cukup. Jadi kami ada kerjasama, ada kolaborasi dengan pihak penerbit, dengan pihak swasta seperti bank. Nah itu, jadi untuk mendukung supaya acaranya lebih besar, kalau

[50] Observasi, 10 Oktober 2025
[51] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 Oktober 2025

dianggarkan dari perpustakaan misalnya acaranya cuma 50% bisa terlaksana."[52]



Gambar 4.2 Dokumentasi Porgram Bedah Buku Dinas Perpustakaan dan Kersipan Provinsi Kalimantan Selatan

Selain hasil wawancara, berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada gambar 4.2 memperkuat hasil wawancara tersebut. Publikasi tersebut melaporkan bahwa kegiatan Bedah Buku dan *Workshop Book Review* diselenggarakan pada 8 Agustus 2025 di Aula Dispersip Kalsel sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menghadirkan beberapa penulis, seperti Khairul Trian, Romansaku, Boy Candra, dan Mutia Indah NS. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Sri Mawarni, S.Sos., M.Si., dan dihadiri sekitar 200 orang.[53] Program bedah buku ini biasanya dilaksanakan dalam skala besar, melibatkan partisipasi beragam kelompok masyarakat, serta didukung oleh kolaborasi dengan penulis dan komunitas literasi.

[52] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 Oktober 2025

[53] Https://dispersip.kalselprov.go.id/bedah-buku-dan-workshop-book-review-meriahkan-hari-jadi-ke-75-provinsi-kalsel-2/

Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, Bedah Buku merupakan kegiatan yang bersifat inklusif karena membuka partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat. Kedua, dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam program ini memperlihatkan bahwa program ini mengandalkan kerjasama untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Ketiga, sesi diskusi dalam program ini bukan hanya menyampaikan isi buku, tetapi juga mendorong peserta untuk berpikir kritis, yang merupakan bagian penting dari pengembangan literasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bedah buku merupakan program literasi dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif. Program ini memperluas pengetahuan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi.

b) Perpustakaan keliling

Perpustakaan keliling merupakan program sekaligus layanan perpustakaan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari perpustakaan. Melalui ini, perpustakaan berupaya menghadirkan akses membaca dan informasi secara lebih merata, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses informasi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan perpustakaan keliling, informan menjelaskan bahwa perpustakaan keliling itu tidak hanya ke sekolah-sekolah saja:

> "Perpustakaan keliling itu tidak hanya ke sekolah-sekolah, tetapi juga desa-desa yang meminta kami untuk datang."[54]

> "Tapi kalau di desa terpencil sekali itu jarang, karena keterbatasan anggaran, jadi kami berdasarkan permintaan yang bersangkutan dulu yang meminta kami untuk datang pusling."[55]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa layanan perpustakaan keliling bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun pelaksanaannya masih dibatasi oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya. Kemudian informan lain menambahkan:

> "Kita yang baru ini hari minggu ada di Taman Edukasi Banua Lalu Lintas, yang ada di Banjarmasin."[56]

> "Jadi misal sudah diizinkan, kita akhirnya berkunjung kesana bisa bawa dua armada dan menyesuaikan buku-buku yang mereka minta. Kebanyakan buku-buku yang mereka minta tu kaya lebih ke pengetahuan wirausaha kaya budidaya ikan lele atau budidaya tanaman yang lain."[57]

Kutipan ini memperlihatkan bahwa pemilihan koleksi buku yang dibawa dalam kegiatan perpustakaan keliling disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, misal dalam bidang kewirausahaan atau budidaya, dan lain-lain.

> "Di dalamnya ada buku-buku juga. Kegiatan lainnya kan kita bisa ada berdongeng juga, *storytelling*, kita membawa badut juga untuk menarik anak-anak."[58]

Hal ini menunjukkan bahwa program perpustakaan keliling tidak hanya berfokus pada penyediaan bahan bacaan, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan edukatif dan hiburan untuk meningkatkan

[54] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 oktober 2025
[55] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 oktober 2025
[56] Wawancara dengan ES, Pustakawan, 29 September 2025
[57] Wawancara dengan ES, Pustakawan, 29 September 2025
[58] Wawancara dengan ES, Pustakawan, 29 September 2025

minat baca anak-anak. Gambar 4.3 berikut mendokumentasikan kegiatan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan di Taman Edukasi Banua Lalu Lintas, Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perpustakaan dalam menjangkau masyarakat secara langsung.



Gambar 4.3 Perpustakaan Keliling di Taman Edukasi Banua Lalu Lintas, Banjarmasin

Selain hasil wawancara, berdasarkan publikasi media lokal (Banjarmasin Post) menjelaskan bahwa Program Perpustakaan Keliling telah dilaksanakan di beberapa lokasi, termasuk kegiatan yang tercatat di Taman Edukasi Banua Lalu Lintas.[59] Hal tersebut menunjukkan interaksi pustakawan dengan masyarakat, penyediaan koleksi bacaan, serta pelaksanaan kegiatan pendukung seperti dongeng dan *storytelling* yang menarik minat anak-anak.

Hasil penelitian tersebut ini menjelaskan beberapa temuan penting. Pertama, Perpustakaan Keliling berperan sebagai program penjangkauan yang berupaya untuk mengurangi hambatan geografis

[59] Https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1331951/dispersip-kalsel-hadirkan-pusling-di-taman-edukasi-banua-lalu-lintas-ada-di-akhir-pekan

maupun sosial terhadap akses informasi. Kedua, pelaksanaan berdasarkan permintaan tempat yang ingin didatangkan perpustakaan keliling dan penyediaan koleksi menandakan bahwa program ini bersifat responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketiga, kegiatan pendukung yang bersifat interaktif, seperti *storytelling*, mendongeng, bercerita atau menghadirkan badut dalam perpustakaan keliling, bisa meningkatkan minat atau ketertarikan mereka untuk terlibat dalam program ini. Program ini juga mencerminkan perpustakaan sebagai penyedia layanan yang unik dan relevan bagi masyarakat yang jarang ke perpustakaan.

Dapat disimpulkan, perpustakaan keliling merupakan program dan layanan yang bagus dalam pengembangan layanan inklusif. Program ini berupaya memperluas jangkauan layanan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program bedah buku dan perpustakaan keliling merupakan dua program yang dinilai inklusif oleh informan. Kedua program ini dinilai mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti kegiatan literasi secara terbuka.

2. Promosi

Promosi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan layanan perpustakaan agar lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Promosi dilakukan secara langsung melalui kegiatan

di perpustakaan maupun secara digital melalui media sosial.

Informan menjelaskan:

> "Kita setiap saat ya kita promosi. Bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita bisa, disini juga setiap kali yang kunjungan datang ya kan, ini promosi juga. Kita ada akun Instagramnya kita, perpustakaan Palnam ya. Jadi misalnya minggu ini ada kegiatan mendongeng, ada menulis, atau seminar kena di informasikan supaya masyarakat tau."[60]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan melakukan promosi dengan dua pendekatan. Pertama, bisa melalui kegiatan yang diselenggarakan ataupun kunjungan di perpustakaan. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan aktivitas perpustakaan kepada pengunjung yang hadir secara langsung.

Kedua, promosi dilakukan melalui media sosial, khususnya akun Instagram resmi perpustakaan @perpuspalnam. Melalui akun tersebut, perpustakaan menginformasikan seperti kegiatan yang akan berlangsung, jenis layanan perpustakaan ataupun yang lainnya. Informan mengatakan bahwa promosi dilakukan secara rutin agar masyarakat mengetahui tentang informasi yang ada di perpustakaan.

[60] Wawancara dengan H, Pustakawan, 10 oktober 2025



Gambar 4.4 Promosi Layanan Disabilitas

Sumber: Intagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan @perpuspalnam

Berdasarkan gambar tersebut, ditemukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan promosi layanan disabilitas. Hal ini terlihat dari publikasi resmi di akun Instagram @perpuspalnam yang memperkenalkan "Wajah Baru Gedung Perpustakaan Disabilitas". Promosi tersebut menekankan komitmen perpustakaan dalam menyediakan akses pengetahuan yang setara bagi penyandang disabilitas, dengan menghadirkan lingkungan belajar yang ramah, aman, nyaman, dan mudah diakses.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi dilakukan secara konsisten dan bertujuan agar masyarakat mengetahui informasi tentang perpustakaan yang menyediakan layanan umum, layanan

anak-anak, dan juga layanan disabilitas. Baik kunjungan langsung ke perpustakaan maupun pemberitahuan melalui media sosial digunakan sebagai sarana untuk mempromosikannya. Promosi menjadi bagian dari strategi yang dijalankan oleh perpustakaan agar informasi mengenai apapun yang ada di perpustakaan dapat diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.

3. Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengembangan layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perpustakaan menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa pihak sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan layanan.

Informan menjelaskan bahwa kemitraan yang dijalin melibatkan beberapa instansi, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Informan menyampaikan:

> "Banyak pasti karena perpustakaan atau instansi manapun itu tidak bisa bekerja sendiri dalam hal pelayanan masyarakat, yang pertama tentu para pejabat struktural yang ada di Dinas Perpustakaan. Kemudian kami bekerjasama dengan instansi yang terkait, misalnya Dinas Pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Dinas Kominfo misalnya untuk teknologi informasi. Nah jadi memang banyak yang terlibat."[61]

Pernyataan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kemitraan

[61] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 17 September 2025

yang terjalin tidak terbatas pada satu jenis institusi, tetapi mencakup berbagai lembaga pemerintah dan instansi teknis seperti pejabat struktural Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Kerja sama ini menggambarkan adanya hubungan saling mendukung antara perpustakaan dan mitra-mitranya, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh perpustakaan secara mandiri.

Salah satu bentuk kemitraan yang terjalin adalah kerja sama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perpustakaan Nasional RI melalui kegiatan sertifikasi pustakawan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**.**



Gambar 4.5 Dispersip Kalsel dan Perpusnas RI Bekerja Sama dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan Berbasis SKKNI

Sumber: Website Dispersip Kalsel

Kegiatan ini berlangsung pada 30–31 Oktober 2025 di Aula Dispersip Kalsel, Banjarbaru, dengan melibatkan 60 peserta dari provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan perguruan tinggi. Sertifikasi ini mencakup 14

klaster kompetensi, termasuk layanan anak, layanan remaja, layanan disabilitas, literasi informasi, promosi perpustakaan, serta pengolahan deskriptif dan subjek. Bentuk kerja sama lembaga nasional ini menunjukkan komitmen perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga mendukung pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif sesuai standar nasional.[62]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kemitraan ini menjadi bagian dari strategi dalam mengembangkan layanan perpustakaan inklusif melalui dukungan lintas instansi, mencakup bidang pendidikan, teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

2. Tantangan dalam Mengembangkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan dua tantangan utama dalam mengembangkan layanan perpustakaan agar inklusif, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan anggaran. Tantangan pertama berkaitan dengan kualitas dan kompetensi pustakawan. Informan menyampaikan:

> "Tantangan yang pertama SDM Dinas Perpustakaan itu harus ditingkatkan lagi, jadi masih perlu banyak diikutkan bimtek-bimtek, diklat-diklat terkait profesionalnya sebagai pustakawan supaya bisa melayani lebih bagus lagi."[63]

[62] "Berita" Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, https://dispersip.kalselprov.go.id/berita/

[63] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 oktober 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pustakawan masih memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan layanan perpustakaan yang inklusif. Pustakawan perlu memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dan memahami kebutuhan pengguna yang beragam. Untuk mengatasi hal ini, pihak perpustakaan berupaya meningkatkan kapasitas pustakawan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta diklat yang relevan dengan tugas pelayanan publik.

Tantangan kedua adalah keterbatasan anggaran. Informan menjelaskan:

> "Kemudian tantangan mengenai anggaran, pasti sudah mendengar di luar bahwa anggaran pemerintah ini sekarang lagi dipotong, jadi anggarannya termasuk sedikit, perlu dana-dana CSR."[64]

Pernyataan ini menggambarkan bahwa alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan yang inklusif terbatas, sehingga perlu bantuan dana seperti CSR untuk mendukung kegiatan layanan perpustakaan inklusif. Hal ini juga tampak dari hasil observasi bahwa beberapa fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, seperti tunawicara dan tunarungu, masih belum tersedia karena memerlukan dukungan pendanaan tambahan.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan terdapat dua tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif yaitu SDM dan keterbatasan anggaran.

[64] Wawancara dengan AH, Kepala Bidang, 06 oktober 2025

B. Pembahasan

1. Strategi dalam Mengembangkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan informasi masyarakat semakin kompleks. Perpustakaan tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia koleksi dan tempat membaca saja, agar tak membosankan dikunjungi, sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak perpustakaan, yang jangkauannya luas hingga ke daerah terpencil. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan ikut berkontribusi mengembangkan layanan yang inklusif bagi semua kalangan masyarakat.

a) Perencanaan

Perencanaan dalam mengembangkan layanan perpustakaan inklusif dilakukan melalui pemetaan kebutuhan kelompok pengguna menunjukkan adanya kesadaran perpustakaan untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pemustaka. Pemetaan ini sejalan dengan teori layanan inklusif yang menekankan pentingnya akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam konteks perpustakaan, pemetaan kebutuhan kelompok pengguna menjadi strategi dasar untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh layanan informasi sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian teori bahwa perpustakaan inklusif harus mampu menghadirkan layanan yang ramah, adil, dan dapat diakses oleh semua kalangan sesuai dengan kebutuhannya.[65]

---

[65] Anas Tasyia Zulfa Firnanda, Diana Hertati, "Layanan Perpustakaan Inklusif Bagi Disabilitas Pada Dinas Perpustakaann dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 2, 2024, h. 68, https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/21289.

1. Kelompok Anak-Anak dan Masyarakat Umum

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan koleksi yang mencakup hampir semua bidang ilmu pengetahuan, baik untuk mahasiswa, siswa sekolah, masyarakat umum, hingga pengetahuan umum, dan lain-lain. Temuan ini menunjukkan bahwa perpustakaan telah melakukan pemetaan kebutuhan kelompok pengguna dengan menyediakan koleksi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan bahwa perpustakaan wajib menyediakan layanan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.[66] Dengan demikian, layanan bagi masyarakat umum mencerminkan strategi inklusif yang memastikan akses informasi dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, masyarakat umum dan pemustaka lainnya.

Tak hanya itu, anak-anak juga berhak dalam mengakses sumber daya dan layanan di perpustakaan, yang dirancang secara khusus dengan menyediakan koleksi yang beragam seperti buku cerita, buku bergambar, dan bacaan lain yang sesuai dengan usia mereka. Rak buku dibuat rendah sehingga memudahkan anak-anak untuk menjangkaunya, serta terdapat area bermain seperti ayunan dan perosotan yang menciptakan suasana

[66] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

menyenangkan sekaligus mendukung minat baca sejak usia dini. Penyediaan fasilitas ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang literasi yang ramah anak. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang menekankan kenyamanan serta keterjangkauan layanan.

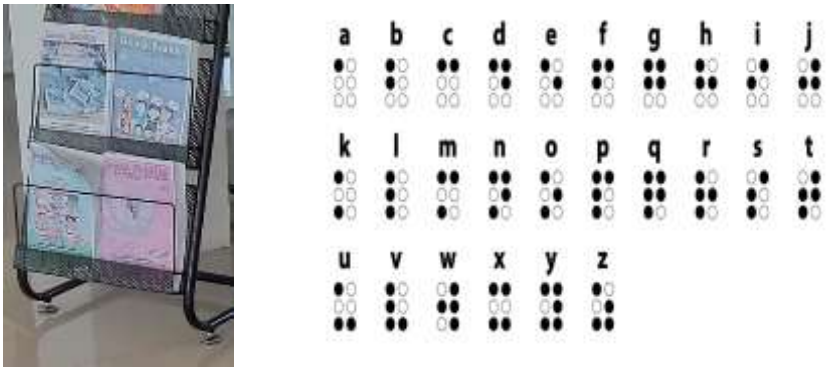
Dengan demikian, pemetaan kebutuhan kelompok masyarakat umum dan anak-anak mencerminkan penerapan nilai inklusif sebagaimana diamanatkan UU No. 43 Tahun 2007, yaitu memberikan akses informasi yang adil dan setara bagi semua kalangan, sekaligus membangun kebiasaan literasi sejak dini dan memperluas akses informasi bagi masyarakat luas.[67]

2. Kelompok Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas juga berhak memperoleh layanan perpustakaan, yakni dengan layanan khusus disabilitas yang menyediakan berupa koleksi braille, komputer dengan pembaca layar, yang tentunya ada tutor pendamping. Berikut penjelasannya

a. Koleksi buku braille, koleksi ini ditujukan bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan.

[67] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan



Gambar 4.6 Koleksi Braille

Sumber: Layanan Disabilitas Dispersip Kalsel

Buku braille menggunakan sistem tulisan timbul yang dapat dibaca dengan sentuhan jari (diraba) sebagaimana pada gambar 4.6 diatas, memungkinkan penyandang disabilitas difabel netra untuk mengakses informasi secara mandiri. Kehadiran koleksi ini menunjukkan komitmen perpustakaan dalam menyediakan sumber bacaan yang relevan bagi disabilitas.

b. Kursi roda bagi disabilitas cacat fisik, fasilitas ini disediakan bagi pengguna yang mengalami kesulitan mobilitas, seperti pengguna dengan kelumpuhan atau gangguan gerak. Kursi roda memungkinkan mereka untuk menjelajahi ruang perpustakaan dengan lebih nyaman dan aman, serta mengakses layanan tanpa hambatan fisik.

c. Komputer dengan pembaca layar (*Screen Reader*), teknologi ini dirancang untuk membantu pengguna difabel netra dalam mengakses informasi digital. Perangkat lunak pembaca layar akan mengubah teks pada layar komputer menjadi suara, sehingga pengguna dapat

mendengarkan isi dokumen, menggunakan komputer secara mandiri.

Temuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan bahwa perpustakaan wajib menyediakan layanan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.[68] Penyediaan kursi roda sebagai hasil observasi juga menunjukkan adanya perhatian terhadap aksesibilitas fisik, meskipun fasilitas bagi tunarungu dan tunawicara belum tersedia. Pustakawan atau pendamping disabilitas ini juga masih kurang, karena hanya ada satu orang yang melayani dan mendampingi mereka dalam menggunakan sarana prasarana yang disediakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perpustakaan telah berupaya memenuhi prinsip inklusivitas, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh jenis disabilitas.

Pemetaan kebutuhan kelompok pengguna yang dilakukan perpustakaan Kalimantan Selatan menunjukkan adanya perencanaan yang berupaya menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun, keterbatasan fasilitas bagi tunarungu dan tunawicara menunjukkan bahwa strategi pengembangan layanan perpustakaan inklusif yang diterapkan belum sepenuhnya didukung oleh struktur dan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori strategi menurut Chandler yang menegaskan bahwa struktur organisasi, sumber daya, dan

[68] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

mekanisme kerja harus menyesuaikan dengan strategi.[69] Dengan demikian, agar prinsip inklusivitas dapat terwujud secara menyeluruh, perpustakaan perlu menyesuaikan struktur layanan dan fasilitas dengan strategi inklusif yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pemetaan kebutuhan kelompok pengguna merupakan bagian integral dari perencanaan dalam mengembangkan layanan perpustakaan inklusif. Pemetaan tersebut telah mampu menjawab kebutuhan anak-anak dan masyarakat umum melalui koleksi dan fasilitas yang relevan, serta menunjukkan komitmen terhadap penyandang disabilitas melalui penyediaan koleksi braille, komputer ramah difabel netra, dan kursi roda. Namun, keterbatasan pustakawan dan fasilitas bagi tunarungu dan tunawicara menjadi tantangan yang harus diatasi agar prinsip inklusivitas dapat terwujud secara menyeluruh.

b) Pelaksanaan

Adapun strategi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan Program Inklusif

Program merupakan salah satu bentuk upaya perpustakaan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua

[69] Alfred D. Chandler Jr., dikutip dalam Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, Edisi ke-13 (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 236.

program yang mencerminkan implementasi strategi ini, yaitu bedah buku dan perpustakaan keliling.

Berdasarkan tabel pada Bab 4.1, program bedah buku dan perpustakaan keliling di Taman Edukasi termasuk elemen penting dalam mendukung pengembangan layanan karena bersifat terbuka untuk umum sehingga mendorong terwujudnya layanan perpustakaan yang inklusif.

a) Bedah buku

Program ini bersifat terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat umum. Pelibatan peserta yang beragam ini selaras dengan teori layanan perpustakaan inklusif, yaitu menekankan akses yang terbuka, partisipasi masyarakat, dan kegiatan literasi yang dapat diikuti oleh berbagai kelompok. Dengan demikian, program ini berupaya mencerminkan prinsip inklusivitas melalui bedah buku sebagai ruang diskusi, dialog, dan keterlibatan aktif peserta.

b) Perpustakaan keliling

Perpustakaan Keliling menunjukkan upaya perluasan jangkauan melalui kegiatan yang dilaksanakan, baik di sekolah, desa, maupun ruang publik seperti di Taman Edukasi. Hal ini sesuai dengan perpustakaan inklusif yang menjelaskan bahwa perpustakaan harus berupaya mendatangi masyarakat yang berada

jauh dari perpustakaan (meskipun jarang), mengatasi hambatan geografis, serta menyediakan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna yang beragam. Dalam program ini, dengan diadakan *storytelling*, dongeng, dan kegiatan pendukung lainnya juga menunjukkan respons perpustakaan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak.

Kedua program tersebut memperlihatkan bahwa perpustakaan menghadirkan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program bedah buku menciptakan ruang partisipatif, sedangkan perpustakaan keliling membuka akses bagi masyarakat yang sulit menjangkau perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa kedua program telah berupaya mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan.

Jika dikaitkan dengan teori, kedua program ini mendukung layanan perpustakaan inklusif. Teori ini menekankan bahwa perpustakaan harus menyediakan akses informasi yang adil, mendorong keterlibatan masyarakat, dan merespons kebutuhan sosial pengguna. Bedah Buku memenuhi aspek partisipasi, sedangkan Perpustakaan Keliling memenuhi aspek pemerataan akses. Dengan demikian, teori inklusif secara menyeluruh mewadahi kedua program tersebut.

Dapat disimpulkan, mengadakan program inklusif telah berhasil diwujudkan melalui program bedah buku dan perpustakaan keliling. Secara keseluruhan, strategi ini efektif dalam upaya memperluas akses,

meningkatkan partisipasi, serta memperkuat fungsi perpustakaan yang terbuka bagi masyarakat.

2. Promosi

Salah satu strategi dalam mengembangkan layanan perpustakaan inklusif adalah dengan melakukan promosi. Strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan penerapan langkah sistematis dalam memperkenalkan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Chandler menekankan bahwa strategi merupakan penentuan tujuan jangka panjang organisasi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.[70] Dalam konteks ini, promosi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan tujuan perpustakaan, yaitu menyediakan dan mengembangkan layanan perpustakaan inklusif, agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi dalam mengembangkan layanan perpustakaan inklusif dilakukan secara berkelanjutan melalui dua cara, yaitu:

1. Pertama, promosi bisa ketika perpustakaan menerima kunjungan atau menyelenggarakan kegiatan. Momen tersebut digunakan untuk memperkenalkan layanan yang dimiliki perpustakaan kepada pengunjung yang hadir secara langsung.

[70]Alfred D. Chandler Jr., dikutip dalam Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, Edisi ke-13 (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 236.

2. Kedua, promosi dilakukan melalui media sosial, khususnya akun Instagram resmi perpustakaan. Melalui platform tersebut, perpustakaan menginformasikan kegiatan seperti mendongeng, menulis, maupun seminar sehingga masyarakat dapat mengetahui yang sedang dan akan tersedia.

Strategi ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya mengandalkan promosi konvensional, tetapi juga memanfaatkan pendekatan digital dan tematik untuk memperkenalkan tentang perpustakaan kepada pengguna. Dalam hal ini, misalnya tentang kegiatan perpustakaan, kegiatan akan diberitahukan melalui instagram bahwa bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum. Penggunaan media sosial ini berupaya memperluas jangkauan informasi, memungkinkan pengguna yang tidak hadir secara fisik tetap mendapatkan informasi.

Selain itu, hasil dokumentasi pada gambar 4.4 menunjukkan adanya promosi khusus layanan disabilitas melalui publikasi “Wajah Baru Gedung Perpustakaan Disabilitas” di akun Instagram resmi @perpuspalnam. Promosi ini menekankan komitmen perpustakaan dalam menyediakan akses pengetahuan yang setara bagi penyandang disabilitas, dengan menghadirkan lingkungan belajar yang ramah, aman, nyaman, dan mudah diakses. Dengan demikian, promosi tidak hanya diarahkan kepada masyarakat umum, tetapi juga mencakup kelompok pengguna dengan kebutuhan khusus.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan**,** yang menegaskan kewajiban perpustakaan menyediakan layanan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Promosi layanan disabilitas memperlihatkan bahwa perpustakaan berupaya memenuhi hak literasi bagi kelompok rentan, sehingga strategi promosi bukan sekadar aktivitas komunikasi, melainkan bagian integral dari pengembangan layanan perpustakaan inklusif.[71]

Berdasarkan teori konsep layanan perpustakaan inklusif, promosi merupakan salah satu elemen dalam mengembangkan layanan inklusif. Tujuan utamanya ialah memperkenalkan masyarakat yang belum mengenal perpustakaan melalui strategi promosi dan informasi perpustakaan yang tersedia.[72]

Dengan demikian dapat disimpulkan, strategi promosi yang dijalankan oleh perpustakaan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan layanan yang inklusif. Melalui promosi secara langsung, pemanfaatan media sosial, serta promosi layanan disabilitas, perpustakaan berupaya memperkenalkan informasi yang ada di perpustakaan kepada masyarakat luas. Strategi ini mendukung prinsip inklusivitas dengan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka, ramah, dan menjangkau berbagai lapisan pengguna, termasuk kelompok rentan.

---

[71] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

[72] Najma Muthia, Kiki Fauziah, "Layanan Berbasis Inklusi Sosial untuk Penyandang Disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor", *Jurnal Dokumentasi dan Informasi,* Vol. 45, No. 2, 2024, h. 146, https://ejournal.brin.go.id/baca/article/view/5699.

3. Kemitraan

Kemitraan merupakan salah satu strategi utama dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif. Melalui kemitraan, perpustakaan dapat memperluas hubungan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga mampu memperkuat kapasitas layanan dan memastikan ketersediaan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks strategi kelembagaan, kemitraan menjadi langkah terencana yang berfungsi untuk memperkuat posisi perpustakaan sebagai institusi publik yang responsif terhadap keragaman kebutuhan pengguna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan kemitraan sebagai strategi penting dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif. Informan menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan dengan berbagai instansi pemerintah seperti pejabat struktural Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi ini memperkuat peran perpustakaan dalam menyediakan layanan inklusif yang lebih baik dan relevan bagi masyarakat yang beragam.

Salah satu bentuk kemitraannya ada pada gambar 4.5, yakni kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI melalui kegiatan sertifikasi pustakawan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Bentuk kerja sama ini berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan 14 klaster kompetensi yang mencakup layanan anak,

remaja, disabilitas, literasi informasi, promosi perpustakaan, serta pengolahan deskriptif dan subjek. Sertifikasi ini memperlihatkan komitmen perpustakaan dalam memastikan pustakawan memiliki kemampuan profesional sesuai standar nasional, sehingga mampu memberikan layanan inklusif yang lebih berkualitas.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa kemitraan berfungsi sebagai bentuk strategi adaptif yang memungkinkan perpustakaan memperluas dukungan lintas sektor dalam pengembangan layanan inklusif. Hal ini menunjukkan adanya peran perpustakaan bukan hanya sebagai lembaga penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang terhubung dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun lembaga nasional, sehingga mampu membangun relasi sosial yang mendukung terciptanya akses informasi yang setara bagi seluruh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori strategi menurut Lawrence dalam Amri Hariri, yang menyatakan bahwa strategi merupakan rangkaian langkah yang tersusun secara sistematis untuk menghubungkan potensi internal organisasi dengan dinamika lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, kemitraan menjadi pedoman bagi perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan jejaring eksternal.

Temuan ini juga sejalan dengan konsep layanan perpustakaan inklusif yang menempatkan kemitraan sebagai salah satu elemen utamanya. Dengan menjalin kerja sama, perpustakaan dapat memperluas pemahaman tentang keberagaman kebutuhan pengguna dan mengembangkan layanan

yang lebih inklusif. Hal ini diperkuat oleh UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 2, yang menetapkan asas kemitraan sebagai dasar dalam penyelenggaraan perpustakaan.[73]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun instansi nasional merupakan strategi yang menjadi fondasi pengembangan layanan perpustakaan inklusif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemitraan tidak hanya memperkuat kelembagaan perpustakaan, tetapi juga mencerminkan prinsip inklusivitas dalam menyediakan layanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian.

2. Tantangan dalam Mengembangkan Layanan Perpustakaan yang Inklusif

Keberhasilan menuju layanan yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan perencanaan, tetapi juga oleh ketersediaan SDM yang kompeten serta dukungan anggaran yang mendukung pengembangan layanan. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan.

Dalam konteks SDM, pustakawan memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam pengelolaan layanan, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan inklusivitas. Upaya peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis dan pelatihan menjadi bagian penting

[73] Najma Muthia, Kiki Fauziah, "Layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor", *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, Vol. 45, No. 2, 2024, h. 146, https://ejournal.brin.go.id/baca/article/view/5699.

dalam memastikan bahwa pustakawan dapat merespons kebutuhan masyarakat yang beragam secara profesional. Pustakawan yang kompeten akan lebih mampu memahami karakteristik pengguna dari berbagai latar belakang, sehingga dapat menghasilkan layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip inklusif.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan signifikan dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan perpustakaan dalam memperluas dan memperdalam kualitas layanan yang diharapkan dapat menjangkau keberagaman pengguna. Dalam beberapa kasus, dukungan dari pihak eksternal seperti dana CSR menjadi salah satu bentuk yang relevan untuk dipertimbangkan dalam memahami konteks tantangan pendanaan yang dihadapi perpustakaan. Namun demikian, keberadaan sumber-sumber tersebut belum tentu mencukupi kebutuhan pengembangan layanan secara menyeluruh. Hal ini juga tampak dari hasil observasi bahwa beberapa fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, seperti tunawicara dan tunarungu, masih belum tersedia karena memerlukan dukungan pendanaan tambahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua tantangan utama dalam mengembangkan layanan perpustakaan yang inklusif, yaitu terkait SDM dan pendanaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Chandler dalam Robbins, yang menyatakan bahwa strategi melibatkan penetapan tujuan jangka panjang organisasi beserta pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkannya. Perpustakaan yang mampu mengidentifikasi potensi dan keterbatasan sumber dayanya akan lebih siap dalam mengembangkan layanan

yang inklusif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[74]

[74]Alfred D. Chandler Jr., dikutip dalam Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, Edisi ke-13 (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 236.